

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini pemerintah dengan giat-giatnya melaksanakan program-program dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat miskin. Sebagaimana halnya pembangunan Nasional, merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Perhatian khusus terhadap berbagai lapisan masyarakat sangat diperlukan supaya terjadi pemerataan pembangunan. Disinilah pemerintah harus bersikap adil, yakni dalam arti mengambil kebijakan dan langkah-langkah pembangunan yang proposional.¹

Setiap program kesejahteraan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah harus dapat menanggulangi masalah kemiskinan. Hal lain yang amat penting dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat adalah partisipasi masyarakat dan lembaga-lembaga sosial masyarakat, karena pemerintah tidak dapat bergerak sendiri dalam melaksanakan pembangunan tanpa merangkul segenap lapisan masyarakat lainnya.²

Pembangunan ekonomi seharusnya mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat berdasarkan azas demokrasi, kebersamaan, dan kekeluargaan yang melekat, serta mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pelaku ekonomi untuk berperan sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Untuk mewujudkannya kesejahteraan bagi

¹ Herman Abdullah, *Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Terkemuka di Indonesia*, (Jakarta: RM Book 2009) hal. 83.

² *Ibid* Herman Abdulah, hal. 84.

seluruh masyarakat, dibutuhkan sebuah bentuk kemitraan yang diartikan sebagai kerjasama pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.³

Pengembangan ekonomi rakyat tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan pada pertumbuhan. Untuk itu perlu upaya yang lebih kuat untuk mendorong percepatan perubahan struktural untuk memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional.

Oleh karena itu, langkah yang amat mendasar yang harus ditempuh adalah membuka akses ekonomi rakyat kepada modal. Dengan demikian, tersedianya modal-modal kredit yang memadai, dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat, sehingga dapat meningkatkan produksi pendapatan dan menciptakan surplus yang dapat digunakan untuk membayar kembali kreditnya, dan melakukan pemupukan modal.⁴

Dengan adanya pinjaman modal usaha kepada masyarakat, hal ini akan dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat, selain itu, ini adalah salah satu cara pemerintah dalam memperdayakan masyarakat dalam mengembangkan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama pembangunan jangka panjang pertama, selain meningkatkan kesejahteraan rakyat, juga telah menumbuhkan kembangkan usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, dan koperasi.⁵

³ Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004), Cet ke 1, hal 101.

⁴ Ginanjar Karta Sasmita, *Pembangunan untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996), Cet ke 1, hal 222

⁵ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2003) Cet. Ke 1, hal. 36-37.

Secara Konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik dibidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.⁶

Diantara makna kemanusiaan yang paling menonjol dalam ekonomi islam adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia. Islam dengan sistem ekonominya telah mendorong manusia untuk bekerja dan aktif berbuat, bahkan memandangnya sebagai ibadah dan jihad. Tetapi dibalik aktivitas itu semua terdapat tujuan kemanusiaan, yaitu merealisasikan kehidupan yang baik bagi manusia.⁷

Setiap manusia mengharapkan kehidupan yang layak, menyenangkan dan sejahtera, karena sesungguhnya hal itu telah dijadikan Allah sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman dan istiqomah dari setiap hamba-Nya.

Dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi, maka perlu dikembangkan sebagai media untuk membangun kesadaran masyarakat dan semua pihak terhadap perubahan untuk pembangunan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah

⁶ Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa. Pedoman umum program pemberdayaan desa (PPD), (Pekanbaru:2009), cet. Ke 2, hal 2.

⁷ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001) hal. 66.

memberikan bantuan sejumlah dana kepada masyarakat desa/kelurahan guna merangsang masyarakat untuk ikut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan. Dana bantuan ini adalah Dana Usaha Desa/ Kelurahan yaitu salah satu Program Pemberdayaan Desa (PPD). Program pemberdayaan desa ini diselenggarakan oleh provinsi riau yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dan mensejahterakan kehidupan masyarakat khususnya untuk di desa/kelurahan.

Keputusan Gubernur Riau Nomor 591/IX/2004 tentang pembentukan komite penanggulangan kemiskinan Provinsi Riau menindak lanjuti keputusan presiden tersebut. Berdasarkan keputusan tersebut pemerintah Provinsi Riau membuat suatu program penanggulangan kemiskinan yang disebut Program Pemberdayaan Desa (PPD) dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa.⁸

Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No. 8 tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka telah memungkinkan bagi desa-desa dikabupaten rokan hulu untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).⁹

Program pemberdayaan desa merupakan langkah pemerintah dibidang ekonomi dalam meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, melalui pemberian dana usaha desa yang berjumlah Rp 500.000.000,-. Dana ini adalah dana bantuan dari pemerintah untuk desa dalam rangka menuju kemandirian desa yaitu untuk mengembangkan ekonomi masyarakat desa, yang mana dana

⁸ <https://www.google.com/#q=uud+provinsi+riau+tentang+ppd>

⁹ <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2011/11/03/bumdes-di-rokan-hulu-provinsi-riau-409304.htmlx>

tersebut dipinjamkan kepada masyarakat secara bergulir untuk menambah modal usaha masyarakat desa. Dari program pemberdayaan desa ini kita akan mengetahui seberapa kemampuan Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Selama Penulis mengamati jalannya Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di desa Rambah ini, penulis bertanya dengan salah satu tokoh yang berkecimpung dalam pelaksanaan PPD itu sendiri, menyatakan bahwa dengan adanya Program Pemberdayaan Desa (PPD) ini usahanya semakin meningkat.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas program pemberdayaan desa dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Kemudian mengangkatnya dalam sebuah tulisan yang berjudul **“EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA (PPD) DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU DI TINJAU DARI EKONOMI ISLAM”**.

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan dalam kajian ini maka penulis memfokuskan pada **“Efektivitas Program Pemberdayaan Desa (PPD) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu di Tinjau dari Ekonomi Islam”**.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat perumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas program pemberdayaan desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap adanya program pemberdayaan desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap program pemberdayaan desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Rambah Hilir kabupaten Rokan Hulu.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa maupun masyarakat umum agar lebih mengenal tentang Program Pemberdayaan Desa (PPD).
- b. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas cakrawala bagi penulis.
- c. Sebagai salah satu Syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S1 pada jurusan Ekonomi Islam dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, salah satu Kecamatan yang mendapat dana usaha dari Program Pemberdayaan Desa (PPD). Penulis memilih tempat penelitian ini karena penulis melihat adanya perubahan yang terjadi pada ekonomi masyarakat yang mendapat dana usaha dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) tersebut.

b. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mendapat dana usaha Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan objek penelitiannya adalah efektivitas program pemberdayaan desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

c. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang mendapat bantuan dana Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Kecamatan Rambah Hilir sebanyak 400 orang. Maka penulis menggunakan metode *Random Sampling*, dengan mengambil secara acak populasi diatas menjadi sampel sebanyak 25% dari jumlah populasi 400 orang yaitu sebanyak 100 orang, *Random Sampling* adalah salah satu metode penarikan sampel yang dilakukan dengan cara acak sederhana dan setiap responden memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih sebagai responden.¹⁰

d. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah meliputi:

1. Sumber data primer yaitu data yang diambil langsung dari pengurus/karyawan Program Pemberdayaan Desa (PPD) dan masyarakat yang mendapat dana usaha dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
2. Sumber data sekunder yaitu data yang diambil dari beberapa buku yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan kelokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.

¹⁰ Muhamad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 160.

2. Wawancara

Yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung mengenai masalah data yang diperlukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian.

3. Angket

Yaitu penyuguhan beberapa angket yang bersifat pertanyaan pilihan ganda yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti.

4. Dukumentasi

Yaitu mengumpulkan data-data atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

G. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Adapun rumusnya adalah:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N = Jumlah frekuensi/ banyaknya individu-individu¹¹

¹¹ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 43

Penarikan kesimpulan berdasarkan dari hasil atau skor persentase akhir, dengan ketentuan atau kategorisasi sebagai berikut:

76% sampai 100% maka akan ditafsirkan pada golongan **Sangat baik**

56% sampai 75% maka akan ditafsirkan pada golongan **Baik**

40% sampai 55% maka akan ditafsirkan pada golongan **Kurang baik**

0% sampai 40% maka akan ditafsirkan pada golongan **Tidak baik**¹²

H. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Deduktif yaitu menggunakan kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Induktif yaitu menggunakan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan tulisan ini kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
3. Deskriptif yaitu menggunakan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan dianalisa.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Cet 2. Hal 246.

BAB III LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan segi teori dari penelitian yang berkenaan dengan pengertian atau definisi, dan Ekonomi Kerakyatan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan hasil penelitian dan pembahasan tentang Bagaimana Efektifitas Program Pemerdayaan Desa (PPD) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Bagaimana Tanggapan Masyarakat Terhadap Adanya Program Pemerdayaan Desa (PPD) dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dan Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Program Pemerdayaan Desa (PPD) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup, dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang penulis peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan, serta penulis akan mengemukakan beberapa saran yang mungkin berguna bagi masyarakat dan pemerintah.